

## ABSTRAK

Christian Oktorico Limbong (00000018991)

### **PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP DIBUATNYA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU**

(viii + 97 halaman; 1 lampiran)

Dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan, Notaris memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, maupun pembuatan RUPS. Dalam membuat akta-akta tersebut sebagai tanggung jawab terhadap profesinya, Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, cermat dan penuh kehati-hatian agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Ditemukannya penggunaan identitas palsu dalam akta pendirian PT. IM yang dibuat oleh Notaris JS menarik untuk diteliti seperti terjadi dalam kasus korupsi videotron di Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dengan terdakwa HS.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus didukung dengan wawancara Notaris. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta pendirian PT yang diketahui cacat syarat material membuat persyaratan PT sebagai badan hukum menjadi tidak sah, sehingga PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, dimana PT tersebut berdomisili atas permohonan dari pihak yang berkepentingan (Pasal 146 UUPT). Permohonan pembubaran PT yang diterima oleh Pengadilan Negeri menyebabkan PT menjadi bubar. Dalam kenyataannya PT tersebut tidak dimintakan pembubaran oleh pihak yang berkepentingan dan justru telah dijual kepada pihak lain dengan tujuan untuk menyamakan perbuatan HS atas perintah RA. Adanya cacat pada proses pendirian dan peralihan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain yang apabila tidak ditindaklanjuti akan berpotensi merugikan pihak ketiga atau kepentingan umum. Dalam kasus ini, Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a, e dan m UUJN serta Pasal 4 Ayat (4) dan (6) Kode Etik Notaris, maka pertanggungjawabannya mengacu Pasal 6 Ayat (1) Kode Etik Notaris. Dari kasus tersebut di atas, seharusnya Notaris JS dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan mengacu pada Kode Etik Notaris, dimana seorang Notaris dijatuhi sanksi kode etik berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, namun kenyataannya hal tersebut tidak ada tindak lanjutnya.

Referensi : 47 (1980-2016)

## ABSTRACT

Christian Oktorico Limbong (00000018991)

### **DISCIPLINARY ACTIONS AGAINST NOTARY'S VIOLATION OF NOTARIZING INCORPORATION DEED USING FALSIFIED IDENTITIES**

(viii + 97 pages; 1 annex)

Notary plays important roles in the business activities of a company, including notarization of incorporation deed, notarized amendment to the articles of association, or notarized resolutions of the annual shareholders meeting. Notary shall, in the course of notarizing such documents under his/her professional responsibility, provide services in accordance with UUJN (Law on Notary Profession) in diligent and prudent manners to avoid undesirable legal issues arising out of such documents in the future. Usage of falsified identities found in the incorporation deed of PT. IM notarized by Notary JS withdraws our attention to conduct an indepthstudy as in videotron corruption case encountered by the Ministry of Small and Medium Enterprises (KUKM) involving HS as a suspect. This study adopted normative approach by which the data was collected using legal and caseapproaches supported by interview with Notary. The results conclusively showed that incorporation deed of PT is found to fail material requirements and causes mandatory requirements for an incorporation to be null and void and, as such, PT may be subject to dissolution in accordance with adjudication of the district court having jurisdiction over the domicile of PT upon request of the interested party (Article 146 of CUUPT). Request for dissolution of PT as received by the District Court should have caused dissolution of the company. In fact, the interested party did not request for company dissolution; instead, ownership of the company was transferred to another party for the purposes of disguising HS' conduct upon RA's instruction. Such defective incorporation and transfer of ownership may, if no furtherance action is taken, cause impairment to the third party's or public interest. In this case, Notary has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a, e and m of the UUJN and Article 4 paragraphs (4) and (6) of Notary Code of Conduct and, as consequence, the Notary shall be subject to disciplinary actions in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (1) of Notary Code of Conduct. From the abovementioned case, Notary JS shall be subject to disciplinary actions including the issuance of reprimand, notices, suspension from notary association, and dishonorable discharge from notary association; but, as the matter of fact, none of these actions is imposed.

Reference: 47 (1980-2016)